



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Februari 2020

Halaman: 15

Kecamatan Diminta Awasi dan Bina Pondokan

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta meminta seluruh kecamatan di kota tersebut mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap pondokan. Pengawasan ini nantinya dibantu oleh personel Satpol PP yang diperbantukan di tiap kecamatan untuk mengantisipasi pelanggaran.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto seperti dilansir dari *Antaraneews.com* menjelaskan, pengawasan dan pembinaan terhadap pondokan perlu terus diintensifkan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran izin termasuk pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

"Kecamatan memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pondokan. Kami tetap bekerja sama dengan wilayah melalui personel yang diperbantukan untuk menjalankan kewenangan tersebut," katanya,

Senin (3/2).

Sebelumnya, ada satu pondokan di Kecamatan Umbulharjo yang ditengarai melanggar aturan karena menyewakan kamar secara harian. Perda tersebut, menurut dia, mengatur secara tegas bahwa pondokan tidak diperbolehkan disewakan kurang dari satu bulan.

"Sudah kami klarifikasi tetapi yang bersangkutan memang belum bisa menunjukkan izin. Diklarifikasi melalui personel kami di wilayah," tambah Agus yang menyebut belum ada tindakan hukum terhadap pondokan tersebut.

Meskipun demikian, Agus menegaskan, jika berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa operasional pondokan tidak didasari atas izin yang dibutuhkan, maka pondokan akan ditutup.

Sementara itu, Camat Umbulharjo Rumpis Trimintarta mengatakan pengawasan pondokan dilakukan bersama

dengan kampung panca tertib yang sudah terbentuk.

"Perizinan untuk pondokan memang melekat di kecamatan. Tetapi, proses yustisi tetap dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta," katanya.

Rumpis mengatakan, sudah melakukan klarifikasi terhadap satu pondokan atau indekos eksklusif yang ditengarai dioperasikan sebagai hotel virtual yang disewakan secara harian melalui aplikasi tertentu.

"Ada satu yang mengarah ke sana (hotel virtual). Kami sudah datang dan klarifikasi, tetapi pengelola belum mampu menunjukkan izin apapun," katanya.

Meskipun demikian, Rumpis mengatakan, menilai pada kondisi bangunan dengan lebih dari 10 kamar, maka pemilik seharusnya tidak lagi meminta izin untuk pondokan tetapi sudah pada kegiatan penginapan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005